



## **Analisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**

### ***Analysis of the Performance of Government Apparatuses in the Distribution Of The Family Hope Program (PKH) to the Poor in Kenangan Baru Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency***

**Anjuyto Hutabarat<sup>1)</sup>, Yurial Arief Lubis<sup>2)</sup>, Agung Suharyanto<sup>1)</sup>\***

<sup>1)</sup>Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

<sup>2)</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan tunai bersyarat dengan sasaran Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparatur pemerintahan dalam penyaluran PKH pada masyarakat miskin di Kelurahan Kenangan Baru dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penyaluran PKH di Kelurahan Tersebut. Masalah dalam penelitian ini di fokuskan pada kurang optimalnya penyaluran dana bantuan PKH dan juga sasaran penerimaan bantuan PKH yang belum direalisasikan dengan baik. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Mondy, Noe & premeaux mengenai pengukuran kinerja meliputi Kuantitas, Kualitas, Kemandirian, Inisiatif, Adaptasi, Kerjasama. Data yang dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Kuantitas pekerjaan; Penyaluran PKH telah terlaksanakan dengan baik, Kualitas pekerjaan; belum tepatnya sasaran dan waktu penyaluran dana, Kemandirian aparatur; belum mampu bekerja dengan minim bantuan orang lain, Inisiatif; dalam menanggapi masalah data pendamping PKH mengunjungi rumah KPM, Adaptasi; pendamping PKH beradaptasi dengan baik kepada KPM dalam kegiatan bulanan, Kerjasama; kurangnya koordinasi antara pendamping dan aparatur di Kelurahan. Hambatan dalam Penyaluran PKH yaitu tidak sinkronnya data KPM, Kurangnya partisipasi KPM dalam kegiatan bulanan, terbatasnya SDM pendamping, Dana bantuan yang tidak tersalurkan.

**Kata Kunci:** Kinerja; aparatur pemerintah; masyarakat miskin.

#### **Abstract**

The Family Hope Program (PKH) is a conditional cash transfer targeting Very Poor Families (KSM) with the aim of alleviating poverty. This article aims to analyze the performance of government officials in distributing PKH to the poor in Kenangan Baru Village and to find out what are the inhibiting factors in distributing PKH in the Village. The problem in this research is focused on the less than optimal distribution of PKH aid funds and also the target of receiving PKH assistance that has not been realized properly. In order to approach this problem, the theoretical reference from Mondy, Noe and Premeaux regarding performance measurement includes Quantity, Quality, Independence, Initiative, Adaptation, Cooperation. The data collected is based on data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Then analyzed using a descriptive qualitative method. This study concludes that the quantity of work; PKH distribution has been carried out well, Quality of work; not yet precise target and timing of distribution of funds, the independence of the apparatus; have not been able to work with minimal help from others, Initiative; in response to data problems PKH companions visited KPM homes, Adaptation; PKH assistants adapt well to KPM in monthly activities, Cooperation; lack of coordination between assistants and apparatus in the Kelurahan. Obstacles in PKH distribution are not synchronized KPM data, lack of KPM participation in monthly activities, limited companion human resources, and undisbursed aid funds.

**Keywords:** Performance; government apparatus; poor society.

**How to Cite:** Anjuyto Hutabarat, Yurial Arief Lubis & Agung Suharyanto (2024). Analisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran PKH Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 3(1) 2024: 59-67,

## PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan aparatur pemerintahan merupakan alat, orang/pegawai negeri, instansi maupun badan pemerintahan yang mempunyai peran atau tugas untuk melayani sebagai bentuk abdi kepada negara dan abdi kepada Masyarakat (Windy et al., 2023). Dilihat dari tingkat terendah di pemerintahan yaitu pada kelurahan, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat di Daerah Kabupaten/Daerah Kota di bawah Kecamatan (PPRI Nomor 73 Tahun 2005). Kelurahan dipimpin oleh lurah yang statusnya merupakan Pegawai Negeri sipil (PNS), lokasi Kelurahan tepatnya di daerah perkotaan. Tugas dari Kelurahan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah di wilayahnya. Dalam pelaksanaan tugas, lurah dibantu oleh sekretaris daerah beserta perangkat di kelurahan dengan jabatan tertentu (Nainggolan et al., 2022).

Jika dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat, kinerja yang optimal dari aparatur pemerintahan merupakan harapan setiap masyarakat terutama pada tingkat terendah yaitu di Kelurahan. Menurut Mangkunegara (2005) "Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya". Sedangkan menurut Simanjuntak (2005) "Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas tertentu". Penilaian kinerja merupakan proses dimana organisasi berupaya memperoleh informasi yang sangat akurat tentang kinerja para pegawainya. (Siagian dalam Junianto 2020). Syukuri dalam Widiati (2021) menyatakan bahwa ada 4 syarat untuk mendapatkan kinerja yang optimal yaitu, Kemampuan Sumber Daya Manusia yang layak, Melakukan rekrutmen untuk menarik karyawan yang berkualitas, Melakukan pembinaan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan Melakukan pengawasan. Tyson dan Jackson (2010) menyatakan, "meningkatkan kinerja merupakan konsep sederhana tetapi penting. Konsep tersebut didasarkan pada ide bahwa sebuah tim akan meningkat dengan cepat dan terus-menerus dengan cara meninjau keberhasilan serta kegagalannya". Salah satu tugas dan fungsi Kelurahan yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mencapai suatu tujuan pemerintahan. Salah satu tujuan pemerintahan yaitu dalam pengentasan kemiskinan (Nindatu, 2019).

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat (Haughton dan Khandker 2012). Dalam hal kemiskinan pemerintah meyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial untuk membantu masyarakat dalam melanjutkan hidupnya. Salah satu bantuan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat dengan sasaran keluarga maupun seseorang yang miskin dan rentan (Herlina et al., 2020). Keluarga atau seseorang tersebut terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masyarakat tersebut ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan PKH (Permensos RI No 1 Tahun 2018 tentang PKH). Pada PKH di Indonesia sasaran bantuan adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM). Peserta PKH harus dipastikan mendapat akses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Peserta PKH memiliki kewajiban dibidang kesehatan yaitu melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, Pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita.

Pada bidang pendidikan peserta PKH memastikan kehadiran anggota keluarga ke satuan pendidikan sesuai jenjang pendidikan (Sitepu et al., 2019). Untuk KPM PKH penyandang disabilitas kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya. Program bantuan sosial ini juga diterapkan di Kelurahan Kenangan Baru, Bantuan PKH ini diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan (Dewi et al., 2019). Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah diimplementasikan, namun demikian hasil belum optimal, ditandai dengan masih adanya masyarakat miskin yang layak mendapat program bantuan tersebut namun tidak menerima jenis bantuan apapun dari pihak pemerintah, ada juga ditemukan yang telah menerima bantuan PKH ini namun terdapat kendala seperti dana bantuan yang belum dicairkan tanpa alasan tertentu, dan juga data-data masyarakat KPM yang tidak sesuai alamat penerima, ini ditemukan melalui penelitian di Kelurahan Kenangan Baru (Herlina et al., 2020).

Adapun kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang digunakan peneliti antara lain Penelitian Ery Kusnadi (2022), dengan judul "Kinerja Pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun". Berdasarkan hasil penelian diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian Irvan Junianto (2020) yang berjudul "Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim". Hasil penelitian menunjukkan hasil yang kurang baik dikarenakan kurang disiplinnya pegawai menjalankan pelayanan dan juga sarana dan prasarana yang belum memadai di Kantor Kelurahan tersebut. Penelitian Maulida Rachma (2022) hasil pada penelitian ini bahwa Hambatan Pelaksanaan PKH dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan, terdapat hambatan internal dan eksternal yang belum terselesaikan. Penelitian Yogi Ade Supratman (2019) yang berjudul "Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar". Hasil Penelitian yaitu pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan PKH Kepala Desa Tapung Lestari juga transparan dan melakukan musyawarah bersama masyarakat KPM PKH. Penelitian Kusman Yuhana (2019) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang". Hasil penelitian menunjukkan masih belum optimal banyak hal yang harus di perbaiki dan ditingkatkan dalam mekanisme sesuai aturan prosedur pelaksanaan program PKH, dari proses kegiatan pertemuan awal, validasi, pembentukan kelompok, pemuhtahiran data, verifikasi komitmen peserta dan penyaluran bantuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran Pogram Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan untuk mengetahui apa saja hambatan dala penyaluran PKH di Kelurahan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moeleong, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur pemerintahan di Kelurahan Kenangan Baru dalam penyaluran PKH pada masyarakat miskin. Penelitian kualitatif mencakup pengumpulan data studi kasus, wawancara serta pengamatan pribadi. Tipe penelitian adalah deskriptif digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan fenomena aktual dan faktual yang terjadi di lapangan,.

Melalui metode Kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tulisan, ucapan dan perilaku yang ditemui pada saat pengamatan dari suatu individu, kelompok/komunitas masyarakat dan organisasi dalam konteks tertentu sehingga memberikan pandangan penelitian yang lengkap, komprehensif dan holistik. Penelitian kualitatif umumnya dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsionalisasi organisasi, kegiatan sosial dengan menggunakan prosedur statistik atau cara pengukuran lainnya. Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini maka peneliti dapat menggambarkan bagaimana permasalahan yang berhubungan dengan "Analisis Kinerja aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran PKH Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru".

Pada penelitian ini, informan memiliki peranan yang penting dalam proses pengambilan data atau informasi. Informan penelitian merupakan orang yang mampu memberikan informasi secara langsung. Afrizal (2016) mengatakan bahwa informan penelitian merupakan seseorang yang dapat memberikan suatu informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau memberikan informasi mengenai kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara secara keseluruhan. Informan Penelitian Kualitatif menurut Afrizal dibagi menjadi 3 yaitu; Informan Kunci merupakan seseorang yang mengetahui seluruh informasi yang dibutuhkan pada penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Lurah Kenangan Baru Bapak Rizal Arifin, S.STP. Informan Utama merupakan seseorang yang mengetahui secara teknis dan detail mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan utama pada penelitian ini adalah Pendamping Sosial PKH di kelurahan Kenangan Baru yaitu Ibu Windasari. Informan tambahan merupakan seseorang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis. Informan tambahan pada penelitian ini adalah Sekretaris Lurah dan masyarakat penerima PKH yaitu, Ibu Jojor, Ibu Agus Susanti dan Ibu Dian Chandra Dewi di kelurahan Kenangan Baru.

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2018) Analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain. Melalui Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kenangan Baru mengenai Penyaluran PKH dilakukan analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Untuk melihat bagaimana kinerja aparatur pemerintahan dalam penyaluran PKH di Kelurahan Kenangan Baru, peneliti menggunakan Teori Pengukuran Kinerja Dari Mondy, Noe & Premeaux dalam Priansa (2014) yang terdapat dalam 6 indikator yaitu Kuantitas pekerjaan, Kualitas pekerjaan, Kemandirian, Inisiatif, Adaptasi dan Kerjasama.

**Kuantitas Pekerjaan.** Kuantitas Pekerjaan berkaitan dengan seberapa banyak pekerjaan atau volume pekerjaan yang terselesaikan dan produktivitas kerja yang di hasilkan dalam kurun waktu tertentu (Sativa et al., 2022)s. Kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, volume dan banyaknya pekerjaan yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditemukan melalui wawancara kepada informan. Penyaluran bantuan PKH yang dilakukan oleh aparatur di kelurahan mulai tahun 2015. Pada tahun 2022 terdapat 40 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima PKH dan tahapan pertahun yaitu 4 (empat) kali dalam setahun. *Input* Data dilakukan oleh aparatur Kelurahan, serta Pendamping PKH yang melakukan tugasnya dalam Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Berikut hasil wawancara terhadap Informan Kunci :

"PKH di kelurahan Kenangan Baru ini di mulai sejak tahun 2015 dan tentunya masih berjalan hingga saat ini, kalau dari jumlah KPM PKH pada tahun 2022 ini berjumlah 40 KPM PKH dan untuk dananya setiap tahunnya bertahap dan dilakukan 4 tahap penyalurannya tahap pertama itu ya di mulai dari antara bulan Januari-maret, tahap ke k 2 bulan april-Juni dan begitu seterusnya, penyaluran dananyanya juga berjalan sesuai waktu dan tahapan yang ditentukan. Keluraha Juga melakukan *input* data masyarakat yang akan di ajukan menjadi penerima bantuan selanjutnya sesuai syarat dan ketentuan program PKH".

Berikut hasil wawancara terhadap Informan Utama:

"Untuk tugas saya selaku pendamping PKH adalah memberikan dampingan kepada KPM sekaligus membuat rencana kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang akan dilakukan dan saya membentuk kelompok dan ketua kelompok supaya lebih memudahkan koordinasi dengan KPM, dan juga memberikan pemahaman untuk lebih mengerti tujuan dan manfaat PKH ini".

**Kualitas Pekerjaan.** Menurut Mondy, Noe & Premeaux dalam Priansa (2014) Kualitas Pekerjaan merupakan mutu yang dihasilkan dari suatu pekerjaan oleh pegawai dengan acuan pertimbangan ketepatan, ketelitian, kerapian, dan kelengkapan dalam menangani tugas-tugas yang di emban dalam suatu organisasi maupun lembaga milik pemerintah. Mengenai Kualitas pekerjaan hasil wawancara menunjukkan tidak tepatnya sasaran penerima PKH dan kemudian adanya dana yang tidak tersalurkan kepada KPM mengakibatkan buruknya kualitas pekerjaan yang dilakukan aparatur yang menjadi penyalur bantuan. Adanya masyarakat yang dikatakan mampu tetapi menerima bantuan, terlihat dari rumah yang berkeramik dan berpagar dan juga KPM PKH tersebut tidak tinggal di alamat tersebut. Berikut hasil wawancara kepada informan tambahan mengenai sasaran yang belum tepat yaitu:

"Dian Chandra dewi itu keponakan saya memang dia menerima PKH. Ponakan saya itu tidak tinggal di sini, dia bersama suaminya tinggal di daerah Tembung. Rumah ini bukan tempat tinggalnya lagi mereka hanya sesekali datang kesini biasanya 2 minggu sekali".

Berikut hasil wawancara kepada KPM mengenai dana bantuan yang tidak tersalurkan:

"Tahapan penyaluran dananya ada 4 tahap dek dalam setahun, untuk tahun ini sebenarnya dananya cair semua mulai dari tahap 1 dengan tahap 2 tapi di tahun sebelumnya di tahap 4 itu dana yang ke saya itu gak cair, ga tau kenapa dana yang ke saya itu ga keluar".

**Kemandirian.** Kemandirian merupakan pertimbangan tingkat kemampuan seorang karyawan untuk bekerja secara mandiri dan mendukung tugas dengan bantuan minimal dari orang lain, kemandirian juga mewakili komitmen karyawan/pegawai dalam hal ini aparatur pemerintahan harus mampu bekerja tidak perlu diawasi dan mampu menjalankan sendiri fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari orang lain ataupun pengawas (Karyati et al., 2020). Kemandirian yang dimaksud kedalam penelitian ini adalah kemandirian aparatur pemerintah dalam hal pengurusan dalam penyaluran PKH pada masyarakat miskin, dimulai tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan dari pendaftaran pendataan maupun sosialisasinya ke Masyarakat (Herlina et al., 2020). Mampu bekerja dengan meminimalisir bantuan dari pegawai lain. Hasil dari wawancara terhadap Informan menunjukkan bahwa Kemandirian Aparatur Pemerintahan sudah baik, namun ketika dalam pengurusan ada hal yang memang bertugas dibagian tertentu dan tidak bisa diwakilkan oleh pegawai atau aparatur lainnya sehingga pengurusan tersebut dapat tertunda. Motto yang di tetapkan di kelurahan "Melayani cepat" belum dapat sepenuhnya terlaksanakan. Berikut lampiran wawancara kepada KPM mengenai pelayanan aparatur di Kelurahan:

"Pihak kelurahan ini mereka menurut saya belum bekerja dengan baik karena kemarin waktu daftar PKH ini prosesnya lama, dan biasanya nunggu pak lurah datang dulu atau seklurnya dulu banyaklah alasannya harusnya bisalah juga diselesaikan walaupun ga ada lurah, sekarang dari pendamping sering juga disuruh registrasi ulang".

Wawancara kepada informan kunci mengenai pengurusan data-data masyarakat oleh aparatur Kelurahan:

"Pegawai disini saya rasa kalau dari segi kemandirian dalam bekerja sudah cukup baik, mereka juga bertanggung jawab dengan tugas masing masing, namun terkadang ada suatu pengurusan-pengurusan itu tidak bisa di kerjakan atau di selesaikan itu terjadi karena memang ada suatu bagian bagian khusus yang menanganinya dan tidak semua pegawai bisa ambil bagian dalam semua pengurusan yang dilakukan masyarakat jadi kalau yang bersangkutan tidak hadir semisal ada kepentingan khusus ya kadang masyarakat harus menunggu atau datang di kemudian hari".

**Inisiatif.** Menurut Mondy, Noe & Premeaux dalam Priansa (2014) Inisiatif adalah melakukan suatu pekerjaan tanpa di beritahu terlebih dahulu mengacu pada pertimbangan kemandirian, keluwesan berpikir, dan kemauan untuk bertanggung jawab. Inisiatif yang di maksudkan pada penelitian ini mengacu pada tugas dan tanggung jawab yang tinggi serta adanya kemauan dari dalam diri sendiri dari aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan dalam penyaluran PKH seperti pada pendaftraran masyarakat PKH dan kemudian inisiatif dalam kegiatan yang dilakukan pendamping PKH (Putri et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan Inisiatif Aparatur Pemerintahan di Kelurahan Kenangan Baru sudah cukup baik ditandai dengan Ketika masyarakat datang ke kelurahan untuk pengurusan bantuan PKH pegawai kelurahan memberikan pelayanan sesuai dengan *Standar operation Procedure (SOP)*. Aparatur di Kelurahan juga melakukan *input* data masyarakat yang ingin di daftarkan sebagai calon penerima PKH. Pendamping PKH juga mendatangi rumah KPM PKH jika ada data masyarakat tersebut yang bermasalah. Berikut hasil wawancara kepada informan mengenai Inisiatif dari aparatur pemerintahan dalam hal ini Kelurahan dan Pendamping PKH:

"Pendamping PKH tiap bulannya datang, kami melakukan kegiatan kayak kumpul-kumpul semua anggota KPM PKH ya biasanya kumpulnya itu di rumah KPM ya giliran juga. Kami diajarin bagaimana menjaga bayi mulai dari hamil dan mendidik anak, banyaklah, kemaren juga kami baru-masuk itu diajarin cara buat rinso dengan buat pembersih, pemdamping itu juga mau dia datang kerumah kalau misalnya ada data yang perlu dia datang itu".

**Adaptasi.** Menurut Mondy, Noe & Premeaux dalam Priansa (2014) Adaptasi Merupakan kemampuan untuk beradaptasi, dengan mempertimbangkan kemampuan untuk menanggapi perubahan kebutuhan dan kondisi. Savicaks & Porfeli (2012) mendefinisikan adaptasi sebagai kemampuan seseorang dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan perubahan yang terjadi dalam kondisi kerja. Pada penelitian adaptasi dimaksudkan melihat bagaimana aparatur pemerintahan di kelurahan Kenangan Baru ini bisa beradaptasi kepada masyarakat dengan menanggapi berbagai perubahan yang terjadi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hasil dari wawancara dengan Informan mengatakan bahwa pada perubahan sistem kerja maupun perubahan dalam pergantian KPM (Sianturi et al., 2021), pihak kelurahan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Pendamping PKH di kelurahan Kenangan Baru juga

melakukan adaptasi yang baik terhadap pergantian KPM, pergantian lokasi dampingan serta mampu bersosialisasi dengan baik pada kegiatan P2K2. Berikut lampiran hasil wawancara kepada informan mengenai kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan:

“Adaptasi kami selaku pegawai pemerintah dalam mengalami situasi dan kondisi yang berbeda-beda itu sudah merupakan hal yang biasa, jadi ketika adanya perubahan sistem kerja maupun jabatan kami siap beradaptasi dengan lingkungan. Dengan masyarakat terutama saya sebagai pendamping sosial PKH yang langsung terjun kelapangan memang kami dituntut harus bisa beradaptasi dengan masyarakat karena kamilah selaku pendamping yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta mengajak dan merubah pola pikir masyarakat untuk menjadi lebih maju, kami juga dalam melakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) tentunya sudah beradaptasi dengan masyarakat KPM itu sendiri, kami melakukan pembelajaran dan kami juga menggunakan Grup WhatsApp untuk berkomunikasi sesama KPM”.

**Kerjasama.** Menurut Mondy, Noe & Premeaux dalam Priansa (2014) Kerjasama yaitu melihat kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Kemampuan aparatur pemerintahan Kelurahan untuk mampu bekerja dan bertindak secara bersama dalam menjalankan tugas dengan tujuan untuk mencapai sasaran penyaluran PKH pada masyarakat miskin (Jannah et al., 2022). Dalam hal ini kerja sama yang dimaksud adalah hubungan kolaborasi antara pihak kelurahan dengan pendamping dan juga kepada KPM. Hasil dari wawancara terhadap informan mengatakan bahwa kerjasama antar aparat pemerintahan di kelurahan Kenangan Baru yang bertugas sebagai penyalur bantuan PKH dan pelayan masyarakat tidak berjalan dengan baik. .

Pendamping PKH tidak melakukan komunikasi yang baik terhadap keluhan KPM, pihak Kelurahan juga tidak mampu memberikan alasan yang tepat kepada KPM menyangkut kendala yang di hadapi masyarakat di kelurahan Kenangan Baru. Artinya kerjasama dan komunikasi antar pendamping dengan aparatur kelurahan belum berjalan baik dalam penyaluran PKH kepada KPM itu sendiri (Oktapiani et al., 2022). Berikut lampiran wawancara kepada informan mengenai kerjasama antara pendamping dan Kelurahan dalam partisipasi penyaluran PKH:

“Pihak Pendamping dengan Kelurahan kerjasamanya kurang baik, karena waktu pencairan dana saya tahap 1(satu) dapat yang sekarang tahap 2(dua) harusnya keluar di bulan Empat tahun 2022 ini tapi malah tidak cair dananya, saya tanya ke pendamping PKH mereka tidak memberikan alasan yang jelas malah jawabannya itu ga bagus dibilanglah kalian jangan menuntut karna kalian itu ga kerja kesannya menanggapi dengan jawaban yang tidak baik, pihak kelurahan juga tidak tau apa permasalahannya dana itu tidak cair”.

### **Hambatan-hambatan dalam Penyaluran PKH pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Kenangan Baru.**

**Data-data yang tidak sinkron.** Akuratnya data KPM yang menjadi penerima bantuan PKH ini merupakan hal yang sangat penting agar tercapainya tujuan dan sasaran bantuan. Data-data yang menerima PKH tentu tersimpan di DTKS, adanya ketidaksinkronan data yang ada di DTKS dengan keadaan KPM sebenarnya di lapangan menjadi hambatan ketepatan sasaran penyaluran. ini disebabkan kurangnya update data rutin yang dilakukan sehingga menyebabkan hambatan dalam tersalurkannya data kepada KPM. Ketidak sinkronan tersebut diperlukan registrasi ulang agar data itu bisa diperbaiki dan tentunya juga memakan waktu untuk pemuktahiran data. Kemudian terkait data masyarakat yang layak menerima PKH tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH itu merupakan kewenangan dari pusat. Pihak kelurahan hanya bisa mengusulkan masyarakatnya yang sesuai kriteria penerima PKH. Berikut lampiran wawancara kepada informan:

“Hal yang biasanya jadi hambatan atau kendala itu data yang ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan keadaan masyarakat penerima tidak sinkron itu biasanya terjadi tidak adanya pembaruan data karena data yang ada di DTKS yang diperoleh dari kelurahan, nah kemungkinan tidak adanya updating data-data terbaru sehingga di lapangan dapat dilihat KPM itu ada yang seharusnya sudah bisa di Graduasi (berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH) karna dapat dilihat dari kriteria nya sudah tidak layak lagi misalnya dari segi anaknya yang sudah tamat sekolah, atau anaknya juga sudah tidak lagi

balita dan harsnya berubah itu datanya semua dan ada juga yang sudah mampu dilihat dari segi ekonominya tetapi masih menerima PKH”.

**Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat KPM PKH.** Partisipasi dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap berjalannya program PKH, sebagaimana dalam hal ini masyarakat juga harus turut serta mengikuti segala aturan yang ada pada program PKH (Oktapiani et al., 2022)(Jannah et al., 2022). Hasil yang ditemukan melalui wawancara yaitu partisipasi masyarakat ketika melakukan kegiatan setiap bulan yaitu P2K2 masih mengedepankan pekerjaan masing-masing. Masyarakat juga masih kurang peduli atas kegiatan tersebut walaupun akan diberikan sanksi jika tidak mengikuti kegiatan berturut-turut. Kegiatan itu tentunya memberikan arahan agar supaya KPM ini bisa mandiri dalam menjalani hidup sehari-hari tanpa bantuan PKH terutama di bidang ekonomi. Berikut lampiran wawancara kepada informan:

“Masyarakat KPM PKH ini kalau dilihat dari kegiatan setiap bulannya itu masyarakat ini masih ada yang bermalas-malasan untuk menghadiri kegiatan P2K2, terlambat datang bahkan tidak datang dan tidak memberi alasan padahal kegiatan inilah yang membuat mereka itu lebih banyak mengetahui berbagai hal untuk merubah pola pikir menjadi lebih maju dan mengerti mengenai pentingnya mengetahui cara-cara merawat bayi, kandungan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan dan itu fokusnya PKH ini. Tapi kesannya masyarakat ini banyak yang ga terlalu peduli dengan berbagai alasan tertentu”.

**Terbatasnya SDM pada Wilayah Dampungan.** Sumber daya manusia yang mumpuni dan mencukupi merupakan salah satu hal yang penting bagi tercapainya tujuan PKH. Dalam hal ini tugas pendamping di kelurahan Kenangan Baru yang juga merupakan salah satu hambatan berhasilnya penyaluran PKH. Hasil penelitian melalui wawancara yaitu Kenangan Baru yang juga merupakan salah satu hambatan berhasilnya penyaluran PKH pendamping PKH di kelurahan Kenangan Baru hanya 1 dan tentu saja ada hambatan dengan keterbatasan SDM yang bertugas. Pendamping PKH mengatakan bawa terdapat kesulitan ketika melaksanakan kegiatan P2K2, pendamping hanya mendapat bantuan dari ketua-ketua kelompok yang dibentuk. Kurangnya fasilitas dari pemerintah juga menjadi hal penting untuk terlaksananya kegiatan P2K2, seperti halnya ruang perkumpulan, komputer atau alat infokus untuk mendukung proses kegiatan tersebut.

“Pendamping PKH di kelurahan Kenangan Baru ini hanya saya jadi memang tugas-tugas yang saya lakukan itu tentunya ada juga keterbatasannya, akan tetapi saya selaku pendamping selalu mengusahakan untuk bisa menhandel tugas-tugas itu, misalnya kalau kegiatan bulanan atau mengurai kegiatan yang dilakukan saya dibantu oleh ketua kelompok. Satu pendamping mendampingi semua KPM kan sulit juga, jadi kalo kendala itu pasti ada”.

**Dana Yang Tidak Tersalurkan.** Dana yang tidak tersalurkan akan mengakibatkan terhambatnya tujuan PKH yang bagaimana dana tersebut merupakan suatu bentuk berjalannya bantuan PKH. Dana bantuan PKH itu juga sering tidak tersalurkan dari pusat dikarenakan adanya kesalahan data KPM sehingga harus diregistrasi ulang dan tentunya memakan waktu. Dengan tidak cairnya dana kepada KPM mengakibatkan masyarakat tersebut enggan untuk mengikuti kegiatan P2K2 padahal kewajiban KPM harus mengikuti kegiatan tersebut dan merupakan hal yang penting Masyarakat penerima bantuan PKH malah terkesan lebih mementingkan pekerjaan maupun urusannya sendiri dibandingkan mengikuti kegiatan bulanan. Dana yang tidak tersalurkan tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik. Dana tersebut merupakan penunjang bagi KPM untuk membantu kehidupan ekonomi dan di khususkan untuk mampu memperoleh pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Berikut lampiran wawancara kepada informan yaitu KPM:

“Dana yang tidak cair itu dek ya pasti menjadi kendala sama kami, ya dimana kami kan keluarga miskin tentunya membutuhkan bantuan itu, nah kalau dananya ga cair pasti saya juga kecewa dek, kemaren memang ditanya sama pendamping PKH disini dijawabnya pun ga enak dek, nah kalo dananya ga cair kami jadi malas jugalah dek ikutin kegiatan P2K2 itu dek, walau bagaimanapun dana itu sangat penting bagi kami dan merasa terbantu dengan itu”.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kenangan Baru mengenai penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat miskin di Kelurahan Kenangan

Baru peneliti menyimpulkan dalam pengukuran kinerja aparatur pemerintahan. Kuantitas pekerjaan telah berjalan dengan baik, penyaluran PKH dilakukan dan terdapat 40 jumlah KPM. Kualitas pekerjaan oleh aparatur belum berjalan dengan baik, tidak tepatnya sasaran penerima bantuan karena adanya masyarakat yang dikatakan mampu namun menerima bantuan PKH, kemudian adanya dana bantuan yang tidak tersalurkan. Kemandirian aparatur pemerintahan belum berjalan baik dikarenakan ketika masyarakat melakukan pendaftaran dan pengurusan terkait bantuan PKH aparatur di Kelurahan terkadang tidak mampu menyelesaikan dengan cepat terkait urusan masyarakat tersebut. Inisiatif sudah berjalan dengan baik dalam menanggapi masalah data pendamping PKH mengunjungi rumah KPM. Adaptasi dalam hal ini pendamping PKH beradaptasi dengan baik kepada KPM dalam kegiatan bulanan. Kerjasama dalam hal ini belum berjalan dengan baik, kurangnya koordinasi antara pendamping dan aparatur di Kelurahan. Hambatan dalam Penyaluran PKH juga merupakan masalah yang belum terselesaikan yaitu tidak sinkronnya data KPM, Kurangnya partisipasi KPM dalam kegiatan bulanan, terbatasnya SDM pendamping dan Dana bantuan yang tidak tersalurkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M.A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Ery, K., Imam, Y. P., & Novi, W. (2022). *Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Haughton, Jonathan & Khandker, Shagidur, R. Khandker. (2012). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan; Handbook on Poverty & Inequality*. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development
- Junianto, I., Isabella, I., & Kencana, N. (2020). Analisis kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 5(1).
- Mangkunegara, (2005). Evaluasi kinerja SDM. Tiga Serangkai.
- Moeleong, Lexy J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Priansa, J.D. (2014). Perencanaan & Pengembangan SDM. Bandung: Alfabeta.
- Rachma, M., Hidayat, Y., & Azkia, L. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(2), 93-104.
- Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. *Journal of Vocational Behavior*, 80(3), 661-673. doi: 10.1016/j.jvb.2012.01.011
- Simanjuntak, Payaman J. (2005). Manajemen dan Evaluasi kinerja. *FE Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
- Supratman, Y. A. (2019). Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, UMSU).
- Tyson, Shaun, dan Jackson Tony (2010). *The Esense of Organization Behaviour*. Singapore: Pearson Education Asia Pte. Ltd
- Widiati, Widiati. (2021). Analisis kinerja pegawai kantor desa indrasari kecamatan martapura kabupaten banjar. *As-siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 50-59.
- Yuhana, K., & Kartini, T. (2019). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 63-78.
- Dewi, T. K., Agustar, A., & Mahdi, M. (2019). Pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Dampaknya di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kota Padang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2139>
- Herlina, H., Warjio, W., & Siregar, N. S. S. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 153-161. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.55>
- Jannah, N., Muda, I., & Jamil, B. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area) Implementation of Education Family Pogram (PKH) Policy in The Field of Education (Case Study in the Urban Village of . *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(1), 8-15.

- <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.774>
- Karyati, D., Budiman, A., Rohayani, H., & Sunaryo, A.-. (2020). Model Home Industri Seni : Studi Hasil Pelatihan Pembuatan Busana Tari Dalam Membantu Kemandirian Ekonomi Keluarga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 682–692.  
<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.395>
- Nainggolan, N. U., Batubara, M., & Suharyanto, A. (2022). Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan. *Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 4(1), 83–92. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i1.1154>
- Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan kemiskinan. *Jurnal Persektif Komunikatif*, 3(2), 91–103.
- Oktapiani, N., Warjio, W., & Ginting, B. (2022). Partisipasi Politik Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Program Keluarga Harapan Pada Pemilihan Legislatif 2019. *Perspektif*, 11(3), 1161–1172.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6465>
- Putri, D. P., Priyadi, B. P., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Implementasi Program Jogo Tonggo dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah. *Perspektif*, 11(4), 1492–1500.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6306>
- Sativa, O., Mardiana, S., & Lubis, M. S. (2022). Peranan Analisis Jabatan terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. *Perspektif*, 11(2), 596–606.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6010>
- Sianturi, R. R., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2021). Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sei Kambing B. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 185–191. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Sitepu, Y. A., Kadir, A., & Dewi, R. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 54–61.
- Windy, D., Manik, A., Suharyanto, A., & Lubis, Y. A. (2023). Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai *Performance Analysis of State Civil Servants in the General Section of the Regional Secretariat* o. 5(1), 46–53.